

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM *HAITI COUNTRY STRATEGIC PLAN* OLEH *WORLD FOOD PROGRAMME* TAHUN 2019 – 2023

Pada tahun 2019 hingga 2023, Haiti mengalami kenaikan angka krisis pangan akibat permasalahan internal didalam negaranya. Adapun permasalahan tersebut diantaranya, yaitu terjadinya bencana alam yang terus menerus, ketidakstabilan situasi politik pemerintahannya, dan terjadinya kekerasan oleh kelompok geng pada masyarakat. Hal ini tentu memperburuk tingkat krisis pangan di Haiti dari tahun – tahun sebelumnya. Dalam permasalahan tersebut, maka *World Food Programme* sebagai aktor internasional berperan penting untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi, sebagaimana sesuai dengan tujuan rezim internasional berupa kerangka pembangunan SDGs 2. Upaya yang dilakukan *World Food Programme* guna mengatasi krisis pangan tersebut, yaitu dengan mengimplementasikan program *Haiti Country Strategic Plan* 2019 – 2023, yang disahkan pada 13 Mei 2019. Dengan demikian, penelitian di bab ini akan diuraikan dalam beberapa anatomi.

Pada bagian pertama, penelitian ini akan memaparkan situasi krisis pangan yang terjadi di Haiti pada tahun 2019 hingga 2023. Pada bagian ini akan dideskripsikan dinamika krisis pangan yang terjadi di Haiti pada tahun 2019 hingga 2023, awal kemunculan *World Food Programme*, dan perkembangan hubungan antara Haiti dengan *World Food Programme*.

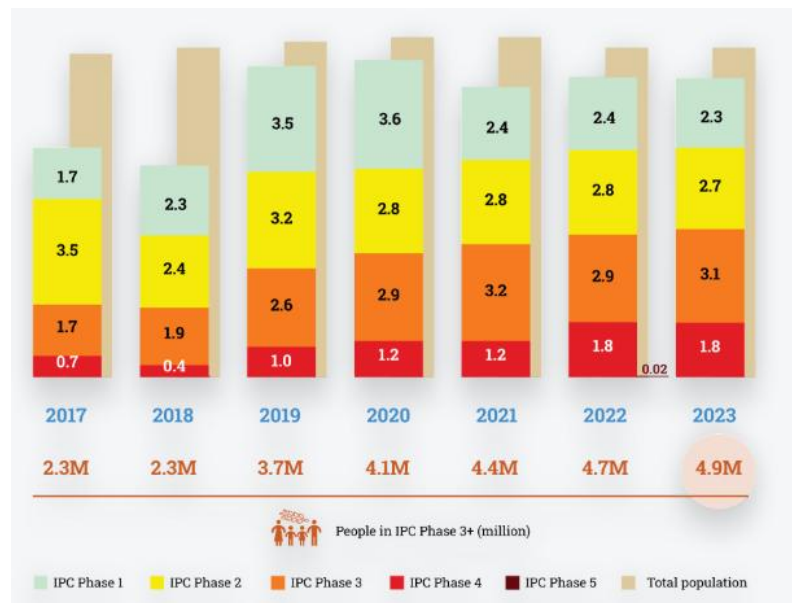
Kemudian, pada bagian kedua, penelitian ini akan menjelaskan implementasi program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* sebagai upaya *World Food Programme* guna mendukung kerangka pembangunan SDGs 2. Dengan demikian, penelitian ini akan mengelaborasi bagian – bagian tersebut dengan analisis, dan data yang konkrit guna menghasilkan suatu narasi yang ilmiah.

2.1. Krisis Pangan di Haiti Tahun 2019 - 2023

2.1.1. Dinamika Krisis Pangan di Haiti Tahun 2019 – 2023

Krisis pangan merupakan salah satu permasalahan terbesar di Haiti akibat situasi internal negaranya. Dalam hal ini, krisis pangan termasuk pada terjadinya permasalahan kelaparan akut, dan gizi buruk. Terhitung hingga tahun 2023, Haiti berjuang untuk melawan masalah krisis pangan Hampir setengah dari populasi di Haiti, dengan lebih dari jumlah 4,7 juta masyarakat mengalami kelaparan akut, dan 1,8 juta masyarakat menghadapi tingkat darurat dalam pemenuhan pangan (ACAPS, 2023). Hal tersebut menyebabkan masyarakat memiliki rasa putus asa untuk dapat memiliki akses ke pasar, mendapatkan makanan, bahan bakar, pekerjaan, dan layanan publik. Kemudian, menurut *Integrated Food Security Phase Classification*, tingkat darurat krisis pangan dapat diklasifikasikan menjadi lima fase, yaitu IPC Phase 1 (tidak ada kerawanan pangan), IPC Phase 2 (tertekan atau stress), IPC Phase 3 (krisis), IPC Phase 4 (darurat), dan IPC Phase 5 (bencana atau

kelaparan) (IPC, 2019.). Dengan demikian, krisis pangan yang terjadi di Haiti pada tahun 2019 hingga 2023 dapat diklasifikasikan ke dalam fase tersebut.

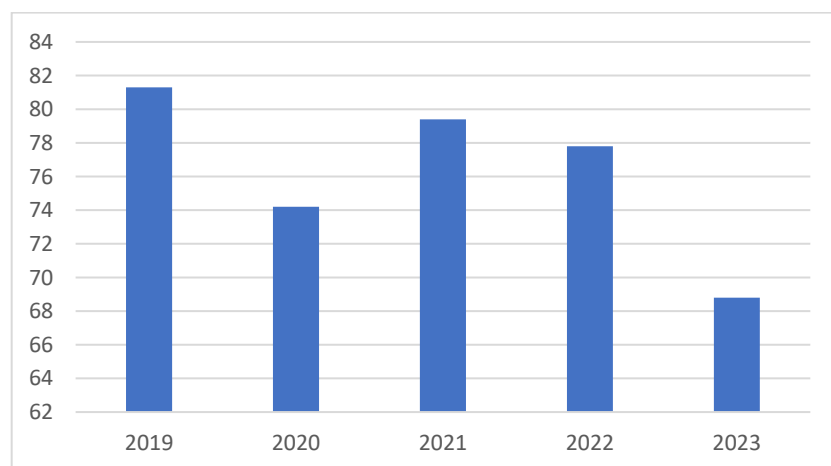


Gambar 2.1 Jumlah Kenaikan Krisis Pangan di Haiti

Sumber: *Global Network Against Food Crises*, 2024

Merujuk pada gambar 2.1, terlihat bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada jumlah krisis pangan 2019 hingga 2023, dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Tingkat krisis pangan akut telah meningkat sejak tahun 2019 dikarenakan berbagai guncangan yang terus menerus terjadi, termasuk guncangan bencana alam yang berulang, terjadinya wabah COVID – 19, ketidakstabilan politik, ketidakamanan negara, dan produksi pertanian yang memburuk (GNAFC, 2024). Lebih lanjut, terlihat juga bahwa populasi Haiti yang terdampak IPC Fase 3 (krisis), IPC Fase 4 (darurat), dan IPC

Fase 5 (bencana atau kelaparan) juga lebih meningkat di tahun 2019 hingga 2023. Dimulai pada tahun 2019, populasi Haiti yang mengalami IPC Fase 3+ berjumlah 3,7 juta jiwa. Kemudian, pada tahun 2020, populasi yang mengalami IPC Fase 3+ meningkat menjadi 4,1 juta jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021, populasi yang mengalami IPC Fase 3+ juga meningkat di angka 4,4 juta jiwa. Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya populasi Haiti mencapai IPC Fase 3 hingga Fase 5, yang berjumlah 4,7 juta jiwa, dimana 200.000 jiwa mengalami IPC Fase 5. Terakhir, pada tahun 2023, populasi Haiti yang mengalami IPC Fase 3+ semakin meningkat dengan menyentuh angka 4,9 juta jiwa. Melalui data yang telah tersedia dapat membuktikan, bahwa pada tahun 2019 hingga 2023 menjadi periode krisis pangan yang meningkat secara signifikan, dimana Haiti memasuki krisis pangan fase krisis, darurat, dan bencana.



**Grafik 2. 1 Indeks Produksi Pangan di Haiti
Tahun 2019 – 2023**

Sumber: *Statista*, 2024

Merujuk pada grafik 2.1, dapat dilihat bahwa Haiti mengalami ketidakstabilan produksi pangan secara lokal pada tahun 2019 hingga 2023. Pada periode tahun 2019 hingga 2023, tahun 2019 merupakan indeks tertinggi produksi pangan di Haiti. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang belum mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Namun, pada tahun ini Haiti juga mengalami bencana alam El Nino, yang mengakibatkan sumber pangan mengalami kekeringan. Kemudian, pada tahun 2020 Haiti mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh kemunculan kelompok geng yang mulai merusak lahan pertanian masyarakat, dan terjadi bencana alam seperti badai matthew, serta COVID – 19 (GNAFC, 2024). Pada tahun 2021, Haiti mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dimana Haiti sempat mendapatkan bantuan darurat berupa pemberian benih pertanian oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2023). Namun, pada tahun 2022 dan 2023 Haiti mengalami kemerosotan yang cukup drastis pada produksi pangan akibat kompleksitas situasi di Haiti. Hal ini disebabkan oleh kelompok geng yang merusak lahan pertanian masyarakat, dan merusak Gudang *World Food Programme* yang diantaranya terdapat bantuan bagi petani lokal. Dengan demikian, terjadinya ketidakstabilan produksi pangan di Haiti merupakan akibat dari ulah kelompok geng, dan terjadinya bencana alam yang terus – menerus, yang memicu krisis pangan semakin meningkat.

Ketidakstabilan produksi pangan tentu mempengaruhi terjadinya krisis pangan yang dialami oleh Haiti mulai mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019. Dalam laporan tahunan *World Food Programme*, Haiti merupakan negara dengan tingkat krisis pangan tertinggi di dunia, yang dikarenakan lebih dari separuh penduduknya menderita malnutrisi kronis, dan 22% penderitanya adalah anak – anak (WFP, 2019). Hal ini terjadi akibat banyaknya permasalahan yang muncul, dimulai dengan terjadinya bencana El Nino, yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah, sehingga mempengaruhi penurunan produksi tanaman pangan utama (ACAPS, 2023). Lebih lanjut, fenomena ini telah merusak lahan pangan di Haiti hingga sebesar 19,8% sehingga mengakibatkan penurunan produksi pangan. Selain itu, fenomena tersebut juga menyebabkan harga komoditas di Haiti menjadi naik 9% per tahun, yang disertai dengan terjadi inflasi secara umum sebesar 14,1% (IPC, 2023). Akibat dari terjadinya fenomena ini, Haiti mengalami krisis pangan, dan gizi buruk fase 3 dan 4, dengan sekitar korban kelaparan darurat sejumlah 3,7 juta jiwa (ACAPS, 2023). Disisi lain, Haiti juga masih mengalami ketegangan sosial dan politik yang menyebabkan penghentian kegiatan ekonomi dan sosial di Port au Prince, Les Cayes, Gonaives, dan Cap Haitien. Ketegangan ini merupakan kelanjutan dari kerusuhan sipil, yang terjadi di Haiti pada tahun 2018 akibat adanya inisiasi pemerintah

untuk menghapus subsidi bahan bakar (Jayla, 2024:5). Dengan demikian, kenaikan krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya fenomena alam, dan ketegangan politik pemerintahannya menjadikan satu - satunya negara dengan berpendapatan rendah di Amerika dengan menduduki peringkat ke 169 dari 189 negara pada Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 (WFP, 2019:6).

Krisis pangan ini masih berlanjut hingga tahun 2020. Menurut laporan yang ditulis oleh *Human Rights Watch* tahun 2020, Haiti masih mengalami ketidakstabilan politik, dan mulai terjadi kekerasan oleh kelompok geng, yang menyebabkan krisis pangan semakin memburuk. Ketidakstabilan politik ini disebabkan oleh adanya penundaan pemilihan legislatif, sehingga banyaknya kelompok geng melakukan aksinya ditengah kekosongan kekuasaan pemerintahan. Lebih lanjut, terjadinya kasus pertama wabah COVID-19 pada tanggal 19 Maret juga memperburuk situasi yang ada di Haiti. Situasi tersebut menyebabkan tingkat krisis pangan di Haiti meningkat sebesar 67,8% (WFP, 2020:2). Adapun krisis pangan yang terjadi di tahun ini cukup kompleks, yaitu disebabkan oleh inflasi, curah hujan dibawah tingkatan normal sehingga merusak lahan pertanian, terjadinya badai laura, dan dampak dari adanya COVID-19. Lebih lanjut, melalui laporan resmi *Integrated Food Security Phase Classification 2020*, Haiti mengalami

kerawanan pangan akut yang tinggi dengan masyarakat terdampak sebanyak 4,1 juta jiwa berada di IPC Fase 3 dan 4. Hal ini juga diperparah dengan sikap Pemerintah Haiti, yang terus bergantung pada impor pangan dengan presentase lebih dari 50% dari pangan yang tersedia. Dengan demikian, krisis pangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebagai akibat dari adanya ketidakstabilan politik di Haiti, dan terjadinya bencana alam yang terus menerus.

Puncak krisis pangan terjadi pada tahun 2021, dimana Haiti mengalami bencana alam gempa bumi yang besar, dan situasi politik yang semakin memanas. Haiti menjadi salah satu negara paling rentan di seluruh dunia terhadap bencana alam, seperti badai, banjir, dan gempa bumi (World Bank, 2024). Pada tanggal 14 Agustus 2021, Haiti dilanda gempa bumi berkekuatan 7,2 Skala Richter dimana kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan tahun 2010, yang terjadi di Haiti bagian selatan dengan jumlah korban masyarakat sebesar 1,6 juta orang (Perel & Halpert, 2022). Selain gempa bumi, pada tanggal 16 Agustus disusul dengan terjadi Badai Tropis Grace, yang menambah korban kerawanan pangan hingga 160.000 jiwa (WFP, 2022). Lebih lanjut, bencana tersebut terjadi ketika Haiti masih terguncang oleh ketidakstabilan politik dengan adanya peristiwa pembunuhan Presiden Jovenel Moise. Presiden Jovenel Moise diduga dibunuh oleh tentara bayaran asing di Port au

Prince pada 7 Juli 2021. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa ini dikarenakan adanya gerakan oposisi Haiti yang telah lama menyerukan Moise untuk mengundurkan diri sebagai Presiden (OHCHR, 2022). Situasi tersebut mengakibatkan sejumlah 4,4 juta jiwa di Haiti diklasifikasikan masuk pada IPC Fase 3 dan 4. Dengan demikian, krisis yang terjadi di tahun 2021 sangat memperlihatkan akibat gejala bencana gempa bumi yang lebih besar dari tahun 2010, dengan disertai adanya pembunuhan Presiden Haiti, yang menyebabkan terjadinya kekosongan pemerintahan yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat Haiti.

Sepanjang tahun 2022, kombinasi dari adanya ketidakstabilan sosial dan politik, kekerasan oleh kelompok geng, dan terjadinya wabah kolera mengakibatkan terjadi krisis pangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Haiti. Krisis ini disebabkan akibat kekosongan kekuasaan pemerintah Haiti pasca terjadinya pembunuhan Presiden Jovenel Moise di tahun sebelumnya, sehingga beberapa distribusi pangan tidak tersalurkan kepada masyarakat (WFP, 2023). Selain itu, kelompok geng mulai beredar di beberapa wilayah, seperti di terminal bahan bakar utama di Port au Prince, yang mengakibatkan terhambatnya distribusi bahan bakar selama satu tahun. Hal ini menyebabkan kurangnya akses ke bahan bakar berdampak buruk pada bisnis, sekolah, rumah sakit, serta

menyebabkan kekurangan air bersih. Pemerintah Haiti yang saat itu digantikan oleh Perdana Menteri Henry melaksanakan pemerintahan tanpa mandat konstitusional (HRW, 2023). Perdana Menteri tersebut tidak mampu mengadili kelompok geng yang melakukan pelanggaran, ditambah dengan pengangkatan hakim yang terhenti. Akibat dari tidak adanya penangkapan atas kelompok geng tersebut, menyebabkan sebanyak 96.000 masyarakat Haiti mengungsi ke Port au Prince hingga ke Amerika Serikat, dan Republik Dominika, dan beberapa lahan pertanian menjadi rusak (Dewi, 2023:24). Selain permasalahan politik, wabah kolera juga menyerang Haiti. Terhitung hingga Desember 2022, terdapat jumlah masyarakat terdampak sebanyak 1,2 juta jiwa (WHO, 2022). Menurut WHO, bangkitnya wabah kolera ini juga disebabkan oleh situasi ketidakamanan Haiti, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan terhambatnya distribusi pasokan pangan. Hal tersebut menjadikan hampir setengah dari populasi Haiti berada pada krisis pangan fase tertinggi, yaitu IPC Fase 5 dengan sejumlah 200.000 ribu jiwa, dan IPC Fase 3 dan 4 sejumlah 4,5 juta jiwa. Dengan demikian, Haiti termasuk dalam lima negara dengan “*worst deterioration in peacefulness*” di tahun 2022 (WFP, 2023).

Periode terakhir dalam siklus kenaikan krisis pangan terjadi pada tahun 2023. Pada tahun ini, Haiti mengalami beberapa

guncangan seperti inflasi yang tinggi akibat depresiasi mata uang gourde terhadap dollar, meningkatnya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan gagal panen, dan memburuknya situasi keamanan akibat maraknya kekerasan oleh kelompok geng (IPC, 2023). Selain itu, menurut laporan *Global Peace Institute* 2024 menyatakan bahwa, Haiti mengalami kenaikan drastis sepanjang tahun dalam terjadinya penculikan, pembunuhan, dan kekerasan seksual oleh kelompok geng. Hal ini menyebabkan kerentanan yang struktural terhadap krisis pangan, sehingga mengakibatkan tingkat sensitif masyarakat yang tinggi terhadap terjadinya guncangan. Lebih lanjut, populasi yang terdampak krisis pangan pada situasi ini termasuk dalam IPC Phase 3 dan 4, dengan jumlah 4,9 juta jiwa (IPC, 2023). Angka tersebut merupakan angka terbesar dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dengan demikian, melalui adanya krisis pangan yang terjadi di tahun 2023, maka Haiti dijuluki dengan “*the second largest deterioration in peacefulness*”.

2.1.2. Awal Kemunculan *World Food Programme*

World Food Programme merupakan organisasi kemanusiaan internasional dalam bidang pangan, yang secara resmi beroperasi sejak tahun 1961. Seringkali organisasi ini sulit untuk dibedakan dengan *Food and Agriculture Organization* meskipun keduanya berada dalam naungan *United Nations*. *World Food Programme* bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan pangan, dan logistik

untuk menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat, serta meningkatkan kualitas gizi individu yang paling rentan di masa krisis (WFP, 2020). Disisi lain, *Food and Agriculture Organization* merupakan organisasi internasional, yang bertanggung jawab secara teknis dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam jangka panjang (FAO, 2017). Melalui kedua perbedaan tersebut, dapat dipahami bahwa *World Food Programme* merupakan organisasi kemanusiaan yang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan bantuan pangan, sedangkan *Food and Agriculture Organization* merupakan organisasi internasional yang membantu meningkatkan ketahanan pangan secara teknis. Lebih lanjut, *World Food Programme* merupakan organisasi internasional, yang didirikan oleh *Food and Agriculture Organization* bersama *United Nations*. Hal ini ditujukan untuk melaksanakan misi utama untuk mengakhiri kelaparan di dunia, memberikan bantuan pangan, serta nutrisi kepada negara berkembang maupun terbelakang, korban perang, konflik sipil, dan bencana alam (WFP, 2018). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *World Food Programme* merupakan organisasi kemanusiaan terbesar, yang berfokus pada pemberian bantuan pangan secara langsung.

Pada proses pembentukan *World Food Programme*, *United Nations* dan *Food and Agriculture Organization* memainkan peran

penting yang menjadi latar belakang perkembangan dalam pemanfaatan surplus pangan dunia. Pada tanggal 27 Oktober 1960, *United Nations General Assembly* telah mengadopsi Resolusi 1496 (XV) terkait dengan penyediaan surplus pangan bagi masyarakat, yang kekurangan pangan melalui sistem *United Nations*, serta *Food and Agriculture Organization* diminta untuk menyusun prosedur yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (The Global Economy, 2022). Selanjutnya, Dewan *Food and Agriculture Organization* saat itu memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal untuk melakukan analisis tentang permasalahan tersebut, dengan membentuk Komite Penasihat Antarpemerintah yang berjumlah 13 anggota. Komite tersebut dibentuk pada bulan April 1961 di Roma, oleh Direktur Jenderal *Food and Agriculture Organization*. George McGovern sebagai *Director of the U.S. Food for Peace Program* memberikan usulan untuk membentuk sebuah program bantuan pangan multilateral dibawah naungan *United Nations* dan *Food and Agriculture Organization*, dengan dana sebesar 100 juta dollar dalam bentuk komoditas, dan uang tunai sebagai percobaan selama tiga tahun (UN, 2019). Hal ini disetujui oleh *United Nations General Assembly* dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa Nomor A/RES/1714 (XVI), yang berbunyi demikian:

“... the action taken at the eleventh session of the Conference of the Food and Agriculture Organization on the utilization of food surpluses and, specifically, its resolution of 24 November 1961 stating that, subject to the concurrence of the General Assembly of the United Nations, an initial experimental programme for three years, to be known as the World Food Programme should be undertaken, having also noted in particular the reference to safeguards contained in paragraph 13 of the above-mentioned resolution..”

Lebih lanjut, *Food and Agriculture Organization* juga mengeluarkan Resolusi 1/16 yang berbunyi demikian:

“...An initial experimental program for three years of approximately \$100 million with contributions on a voluntary basis be undertaken jointly by the Food and Agriculture Organization and the United Nations, in co-operation with other United Nations agencies, and appropriate intergovernmental bodies;

Contributions to the program, to be known as the World Food Program, may be pledged by countries in the form of appropriate commodities, acceptable services, and cash aiming in the aggregate at a cash component of at least one third of the total contributions, and countries should give due regard to the importance of achieving this over-all objective when determining the cash element in their contribution; ...”

Melalui kutipan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *World Food Programme* didirikan atas dasar percobaan selama tiga tahun berdasarkan resolusi bersama Konferensi *Food and Agriculture Organization* dan *United Nations General Assembly*. Resolusi tersebut masing – masing diadopsi pada tanggal 24 November dan 19 Desember 1961, yang ditujukan sebagai badan yang menangani

penyaluran bantuan pangan darurat secara langsung ke daerah – daerah yang terdampak (UN, 2019).

Terbentuknya *World Food Programme* tidak mungkin berjalan tanpa individu yang bekerja didalamnya. Dalam hal ini, tentu membutuhkan sebuah struktur tata kelola, dan kepemimpinan *World Food Programme* yang jelas. Tata Kelola dan kepemimpinan *World Food Programme* diatur oleh Dewan Eksekutif, yang dimana terdiri dari 36 negara anggota, dengan tugas untuk memberikan dukungan antarpemerintah, dan mengawasi arahan kegiatan. Hal ini selaras dengan adanya Resolusi Majelis Umum UN 48/162 tahun 1993, yang menyebutkan bahwa 18 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan 18 anggota lain dipilih oleh Dewan *Food and Agriculture Organization* berdasarkan distribusi di antara lima wilayah regional *United Nations*, yaitu Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur, serta Eropa Barat dan lainnya (Demiere, 2022:20). Lebih lanjut, struktur kepemimpinan telah dimulai pada bulan Mei tahun 1962, dimana A.H. Boerma menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pertama untuk *World Food Programme*. Terhitung hingga saat ini, *World Food Programme* telah memiliki 14 direktur eksekutif sejak diluncurkan pada tahun 1962 secara resmi. Kemudian, *World Food Programme* memiliki struktur yang sangat terdesentralisasi, yaitu memiliki lima kantor regional, dengan kurang lebih delapan puluh kantor di

berbagai negara, memiliki kurang lebih 18.600 staf dengan 80% di antaranya bekerja di kantor lokal untuk *World Food Programme*. Dengan demikian, *World Food Programme* terlihat jelas memiliki tata kelola organisasi, dan kepemimpinan terstruktur, yang hingga saat ini sebagian besar pengelolaannya masih secara otonom, namun tetap berkewajiban memberikan laporan kepada ECOSOC dan *Food and Agriculture Organization*



Gambar 2.2 17 Poin SDG's

Sumber: *United Nations SDGs*

Merujuk pada gambar 2.2, hal ini menjelaskan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda menuju 2030 dengan tujuh belas poin untuk pembangunan berkelanjutan, yang merupakan inisiasi dari *United Nations*, dan telah diadopsi oleh seluruh anggota *United Nations*. Seperti pada penjelasan sebelumnya, *United Nations* dan *Food and Agriculture*

Organization memiliki mandat yang harus dilakukan oleh *World Food Programme*. Mandat tersebut adalah dengan pencapaian tujuan SDGs nomor 2 dan 17, yaitu *zero hunger* dan *partnerships for the goals*. Pertama, pada poin nomor 2, terdapat tujuan untuk masyarakat internasional bebas dari kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong aktivitas pertanian berkelanjutan. Hal tersebut menjadi fokus utama *World Food Programme* dikarenakan menurut laporan resmi *World Food Programme* tahun 2024, tercatat 343 juta masyarakat masih menghadapi tingkat kerawanan pangan yang parah, dengan 74 titik negara tempat *World Food Programme* beroperasi (WFP, 2024). Selain itu, terdapat 1,9 juta orang yang berada di Gaza, Sudan, Mali, dan termasuk Haiti diperkirakan masih mengalami krisis pangan. Adapun penyebab terjadinya kelaparan, yaitu terjadinya konflik, keadaan darurat iklim, dan ketimpangan ekonomi (OCHA, 2025). Dalam mencapai tujuan tersebut, maka hal ini selaras dengan adanya poin 17 yang bertujuan untuk mengikutsertakan seluruh mitra seperti organisasi lokal, sektor swasta, akademisi, dan pemerintah guna mewujudkan kondisi bebas kelaparan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut maka *World Food Programme* melaksanakan mandat untuk mewujudkan kondisi bebas kelaparan di negara terbelakang maupun berkembang, dengan bekerja sama dengan organisasi lokal, sektor swasta, akademisi, dan pemerintah.

Pelaksanaan mandat pertama untuk mewujudkan *zero hunger*, dan *partnerships for the goals* dilakukan pada bulan September tahun 1962. *World Food Programme* melakukan operasi bantuan pertama pasca gempa bumi yang terjadi di Iran (OHCHR, 2022). Bencana tersebut menewaskan lebih dari 12.000 jiwa di Iran, dan menyebabkan terjadinya krisis pangan akut. Dalam menangani permasalahan tersebut, *World Food Programme* langsung mendistribusikan 1.500 ton gandum, 270 ton gula, dan 27 ton teh (WFP, 2020). Lebih lanjut, *World Food Programme* juga melakukan program fisik pertamanya di Mesir Selatan dengan membangun Bendungan Tinggi Asswan di Sungai Nil untuk mencegah bencana banjir, yang mengakibatkan krisis pangan atas kerusakan tanaman, serta kurangnya air bersih. Selain itu, *World Food Programme* juga membantu warga terdampak dengan menyediakan lebih dari 50.000 pasokan pangan, dan memberikan “*school meals*” sejumlah 5.000 anak di Togo (WFP, 2020).

Beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh *World Food Programme* semakin berkembang dari masa ke masa, dimulai dengan pengiriman bantuan menggunakan pesawat kargo saat konflik di Sahel, melakukan penggalangan dana dengan menyelenggarakan acara untuk membantu Ethiopia yang 100 tahun dilanda mengalami kelaparan terpuruk, hingga peluncuran bantuan berupa voucher dan berbasis

tunai. Terhitung hingga saat ini sudah enam dekade dengan lebih dari 120 negara, *World Food Programme* telah melakukan mandat yang diberikan oleh *United Nations* bersama *Food and Agriculture Organization*. Namun, disisi lain *World Food Programme* juga mengalami hambatan dengan adanya krisis dana kemanusiaan internasional pada tahun 2023. Dana kemanusiaan internasional telah berkurang lebih dari 60%, dimana hal ini menjadi salah satu krisis tertinggi dalam sejarah beroperasinya *World Food Programme* (Nagpal, 2023). Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan terjadinya pemangkasan pasokan bantuan pangan di beberapa negara secara drastis. Meskipun demikian, *World Food Programme* tetap berusaha untuk memberikan pasokan pangan yang merata, dengan melakukan kerjasama dengan organisasi lokal seperti USAID, CELAC, dan beberapa sektor swasta lainnya (WFP, 2023).

2.1.3. Perkembangan Hubungan Haiti dengan *World Food Programme*

Hubungan Haiti dan *World Food Programme* telah berjalan sejak tahun 1969. Keduanya menjalin Kerjasama diawali dari terjadinya pembantaian akibat adanya “*The Dictatorial Duvalier Regime*” pada tahun 1969. Sekilas mengenai peristiwa tersebut, Francois Duvalier yang dikenal sebagai *Papa Doc* saat itu terpilih menjadi Presiden Haiti pada tahun 1957 hingga 1971. Rezim yang dipimpin oleh Francois ini dinilai kejam dikarenakan melakukan

lebih dari 50.000 eksekusi pembunuhan masyarakatnya, yang telah dilancarkan aksinya mulai tahun 1957 (Philippe, 2020:12). Kemudian, pada tahun 1963 hingga 1967, para anggota pemerintahan dibawah rezim Duvalier tersebut melakukan penyerangan kerumah warga secara langsung, dan tidak segan langsung melakukan pembunuhan pada anggota keluarga tersebut. Peristiwa tersebut diperkeruh dengan terjadinya pembantaian *VePRES* yang merupakan satu anggota militer dengan Duvalier, dimana terjadi pembantaian sejumlah 27 orang anggota keluarga. Puncak pembantaian terjadi pada bulan Juli tahun 1969, dimana terjadi eksekusi besar – besaran oleh Duvalier secara langsung terhadap anggota partai politik Haiti, dan pembantaian *Cazale* yang merupakan pembantaian terhadap kaum petani, masyarakat kulit hitam, dan anak – anak (Philippe, 2020:20). Melalui adanya peristiwa tersebut menjadi awal mula Haiti mengalami kelaparan akut, hingga banyak masyarakat yang mati kelaparan, dan tidak adanya lahan pangan akibat kerusakan dari peristiwa pembantaian tersebut. Dalam mengatasi situasi tersebut, *World Food Programme* secara langsung melakukan operasi bantuan pertama dengan langsung memberikan bantuan pangan sebanyak 10.000 pasokan melalui jalur udara. Dengan demikian, melalui peristiwa tersebut menjadi awal terciptanya hubungan antara Haiti dan *World Food Programme*.

Masa kelam Haiti tidak berhenti hingga tahun 1960 – an saja, namun pada abad ke 20 Haiti juga masih merasakan kepiluan dalam bidang pangan. Pada tahun 2000 hingga 2004, Haiti masih mengalami kudeta militer akibat pemerintahannya sendiri (Philippe, 2020:25). Hal ini menyebabkan banyaknya korban masyarakat yang meninggal dunia, dan menghadapi kelaparan akut. Puncak krisis kemanusiaan di Haiti terjadi pada tahun 2000, dimana lebih dari 700.000 penduduknya memiliki hidup dibawah garis kemiskinan, dengan pendapatan kurang dari 160 dollar per tahun. Selain itu, krisis tersebut juga diperparah dengan penurunan produksi pangan sebesar 50% dari kebutuhan, dimana 5% hingga 8% merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh *World Food Programme*. Akibat dari adanya siklus ekonomi yang terus menurun, pada tahun 2001 Haiti pertama kali termasuk dalam golongan negara *Least Development Country* (LDC), dengan menduduki peringkat ke 150 dari 174 negara (WFP, 2001:3). Selain krisis ekonomi yang terjadi, anak – anak di Haiti juga mengalami malnutrisi kronis sebesar 32%, dan kekurangan gizi sebesar 8%, kurangnya akses minum yang dapat dijangkau sebesar 20%, serta angka buta huruf yang meningkat sebesar 65%. Disisi lain, Pemerintah Haiti juga masih dalam proses membenahi sistem pemerintahannya akibat kekacauan dari rezim sebelumnya. Dengan demikian, tahun 2000 menjadi

tonggak awal Haiti menjadi negara terbelakang, dan mengalami krisis pangan yang tinggi.

Melihat situasi yang dapat menciptakan krisis pangan berkelanjutan serta krisis lainnya, Dewan Eksekutif *World Food Programme* bersama *United Nations General Assembly* menciptakan bantuan pembangunan pertama berupa program *Country Strategy Outlines* (CSO), yang diresmikan di Roma pada tanggal 26 Oktober 2001. Program tersebut merupakan rencana jangka panjang satu tahun, yang memuat lima dari tujuh agenda penting *World Food Programme* dalam rangka menyejahterakan masyarakat Haiti (Nagpal, 2023). Selain itu, program tersebut dirancang oleh Dewan Eksekutif *World Food Programme*, yang terdiri dari 36 negara anggota, dimana 18 negara anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, dan 18 lainnya dipilih oleh Dewan FAO. Secara kuantitatif, CSO ini bertujuan untuk menjangkau 250.000 penerima manfaat per tahun di Haiti. Lebih lanjut, pada CSO ini *World Food Programme* berfokus pada lima agenda penting yang harus dilakukan oleh *World Food Programme* (Nagpal, 2023). Pertama, yaitu *Food Security and The Poor and Hungry*, dimana agenda ini berfokus keamanan pangan yang dapat menyebabkan kemiskinan serta kelaparan. Menurut *World Food Programme*, Haiti mengalami kerawanan pangan nasional akibat ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi yang kronis, sehingga

secara umum memperburuk pada hampir semua tingkatan usia masyarakat (WFP, 2001:5).

Kedua, yaitu *Government Priorities and Policies Addressing Poverty and Food Insecurity*, dimana agenda ini berfokus mendorong prioritas dan kebijakan pemerintah nasional, dalam menangani kemiskinan. *World Food Programme* mendorong Pemerintah Haiti untuk membentuk sebuah kebijakan keamanan pangan, dan kebijakan bantuan pangan (WFP, 2001:6). Dalam kebijakan keamanan pangan ini, *World Food Programme* membantu Haiti untuk mengoptimalkan kebijakan yang telah dimiliki, seperti peningkatan pendapatan usaha mikro, perluasan program keluarga berencana, serta peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada konteks kebijakan bantuan pangan, *World Food Programme* mendorong mitra yang memberikan bantuan kepada Haiti untuk mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan oleh Haiti (WFP, 2001:6). Seperti halnya ketepatan waktu pengiriman bantuan, pengiriman bantuan sesuai dengan kebutuhan, dan taat administratif.

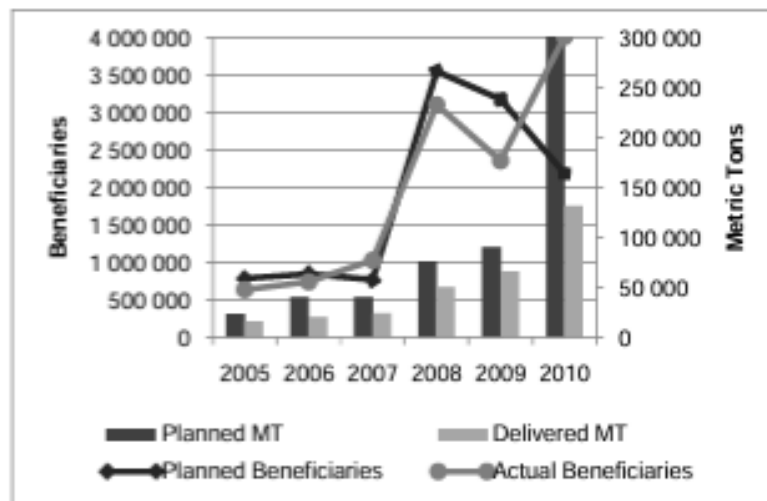
Ketiga, mengenai *Assessment of WFP's Performance to Date*, dimana *World Food Programme* dievaluasi oleh *United Nations* secara langsung, dan *World Food Programme* mengevaluasi terkait bantuan yang ada di Haiti. Adapun bantuan pangan yang dievaluasi oleh *World Food Programme*, yaitu program ketahanan pangan oleh USAID, program pemberian

makanan di sekolah oleh ENFS, dan program Kesehatan oleh CIDA (Rahmania et al., 2024). Keempat, *Future Orientation of WFP Assistance*, dimana *World Food Programme* berfokus pada keberlanjutan bantuan oleh *World Food Programme* itu sendiri. *World Food Programme* mendorong pemerintah maupun masyarakat di Haiti untuk endorog pembelian produk lokal. Hal ini merupakan tindakan jangka panjang yang mampu membantu kenaikan surplus ekonomi Haiti, yang dimana pasar lokal mendapatkan bantuan dari CIDA, FAO, maupun LSM lainnya (WFP, 2001:17). Terakhir, *Partnerships* dimana *World Food Programme* berperan untuk mengintensifkan kemitraan yang ada, dengan tujuan meningkatkan dampak kegiatan bagi populasi sasaran. Contoh dari peran yang telah dilakukan *World Food Programme*, yaitu mendorong *Food and Agriculture Organization* terlibat dalam pengembangan daerah aliran sungai, mendorong UNFPA dan UNICEF terlibat dalam melakukan pelatihan pada kelompok rentan, dan mendorong UNCDF terlibat dalam membenahi infrastruktur pedesaan (WFP, 2001:18). Dengan demikian, melalui program ini terlihat bahwa Kerjasama Haiti dengan *World Food Programme* telah terjalin sejak lama, dengan tingkat tanggap yang tinggi.

Tidak berhenti pada *Country Strategic Outlines* saja, Dewan Eksekutif *World Food Programme* juga membuat program

pembangunan lanjutan, yaitu *Country Programme* (CP) untuk Haiti. Program ini merupakan bentuk lanjutan dari *Country Strategic Outlines*, yang dilatarbelakangi oleh memburuknya situasi ekonomi di Haiti saat itu (Rahmania et al., 2024). Pada tahun 2003, Haiti hanya bergantung pada impor maupun bantuan pangan, dan tidak memiliki produksi pangan tingkat nasional. Selain itu, menurut *Food and Agriculture Organization*, Haiti merupakan salah satu dari tiga negara dunia yang kondisinya sangat dramatis selain Afghanistan, dan Somalia (WFP, 2002:3). Kemudian, Haiti juga sedang dilanda dengan epidemi HIV/AIDS, dengan sejumlah 390.000 masyarakat terdampak HIV positif. Selain itu, *Country Programme* ini memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan sebagai penggerak pembangunan dalam bidang layanan dasar sosial, tata Kelola, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan (WFP, 2003:7). Melalui kontribusi yang diberikan, *World Food Programme* memiliki intensitas yang tinggi untuk memberikan bantuan sebesar 120.000 pasokan pangan., dengan alokasi dana sebesar 25 juta dollar. Perbedaan antara *Country Strategic Outlines* dan *Country Programme* ini dapat dilihat dari struktural bantuan yang diberikan oleh *World Food Programme*, dan intensitasnya. Pada *Country Strategic Outlines*, *World Food Programme* harus mendorong Haiti, yang dimulai dari pembentukan dasar kebijakan, dan mekanisme

bantuan yang harus diterima, sedangkan pada *Country Programme*, *World Food Programme* lebih memberikan bantuan berupa alokasi dana, dan pelatihan yang dapat mengembangkan masyarakat Haiti. Dengan demikian, hubungan Haiti dan *World Food Programme* dapat terlihat dari pembentukan bantuan pembangunan berupa *Country Strategic Outlines*, dan *Country Programme*.



Gambar 2.3 Kenaikan Distribusi Bantuan Pangan

Tahun 2005 - 2010

Sumber: *Haiti Summary Evaluation Report* (WFP, 2011)

Merujuk pada gambar 2.3, hasil evaluasi yang dilakukan oleh *World Food Programme* melalui program *Country Programme* terhadap Haiti pada tahun 2005 hingga 2010 mengalami peningkatan pemberian bantuan pangan. Terlihat pada tahun 2005, penerima manfaat hanya berkisar 600.000 jiwa, hingga di tahun 2010 mengalami lonjakan dengan penerima manfaat

sebanyak 4 juta jiwa. Lebih lanjut, dalam jangka waktu lima tahun tersebut *World Food Programme* telah melakukan sejumlah 14 operasi bantuan, dimana 9 adalah operasi bantuan pangan, dan 5 adalah operasi khusus (WFP, 2010). Hal ini dapat diartikan secara tersirat, bahwa pada tahun 2007 hingga 2008, *Country Programme* tidak mampu lagi menangani permasalahan di Haiti akibat kerusuhan sipil dan politik, krisis pangan, krisis bahan bakar, krisis ekonomi, dan terjadinya bencana alam yang berulang. Lebih lanjut, gempa bumi di Haiti pada tahun 2010 menjadi penyebab utama lonjakan bantuan *World Food Programme* menjadi bertambah besar (WFP, 2010). Dengan demikian, bantuan untuk Haiti yang diberikan oleh *World Food Programme* bersama para mitranya, seperti negara Amerika Serikat, Kanada, Komisi Eropa, serta sektor swasta.

Hubungan Haiti dan *World Food Programme* masih terus berjalan hingga pada pemberian bantuan pembangunan berupa program lanjutan dari *Country Strategic Outlines* dan *Country Programme*, yaitu *Country Strategic Plan*. Program tersebut pertama kali diberikan oleh Haiti pada tahun 2019, yang disebut dengan *Haiti Country Strategic Plan*. *Country Strategic Plan* ini merupakan bentuk rencana jangka panjang lima tahun, yang dirancang oleh *World Food Programme* kepada beberapa negara anggota *United Nations*, dengan dilatarbelakangi permasalahan krisis pangan dari negara tersebut (Mike, 2020:4). Dalam hal ini,

World Food Programme menciptakan *Country Strategic Plan* untuk Haiti, dengan latar belakang krisis pangan yang tengah melanda di Haiti. *Country Strategic Plan* ini resmi dimulai pada tahun 2018, yang kemudian direvisi untuk tahun 2019 hingga tahun 2023, dan saat ini yang sedang berlangsung, yaitu tahun 2024 hingga 2028. Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan kepada *Haiti Country Strategic Plan* tahun 2019 – 2023. Hal ini dilatar belakangi bahwa dalam jangka waktu tersebut, Haiti mengalami peningkatan krisis pangan akibat kondisi internal. Dengan demikian, hubungan antara Haiti dan *World Food Programme* masih terjalin dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan berupa program seperti *Country Strategic Plan*, yang saat ini tengah berlangsung sebagai upaya mengatasi krisis pangan yang terjadi.

2.3. Implementasi Program *Haiti Country Strategic Plan* 2019 – 2023

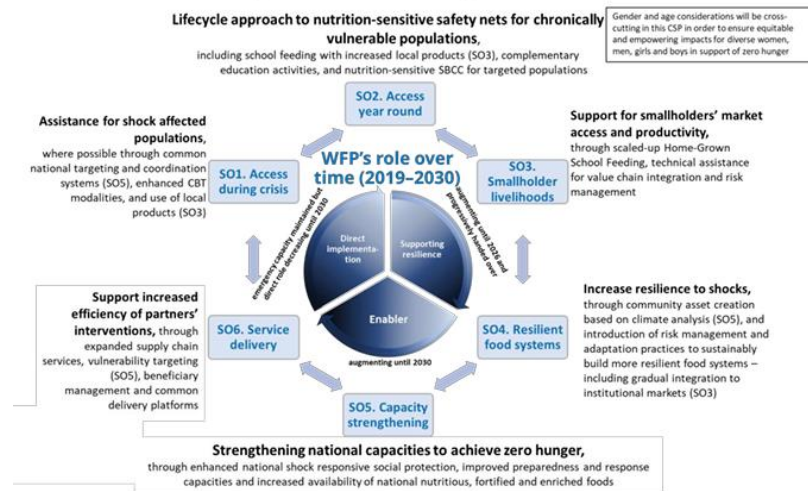
2.3.1. Strategi dan Prioritas Program

Pada permasalahan krisis pangan yang terjadi di Haiti tahun 2019 hingga 2023, *World Food Programme* berperan penting untuk mengatasi krisis tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya untuk memberikan bantuan pembangunan berupa program, yaitu *Haiti Country Strategic Plan* 2019 – 2023. *World Food Programme* sebagai rezim internasional bertanggung jawab untuk melaksanakan mandat *United Nations* melalui SDGs, yang termasuk pada pengentasan krisis pangan di Haiti bersama mitra global (L'ONU en

Haïti, 2018). Menurut laporan resmi *World Food Programme* tahun 2019, program tersebut dibentuk karena terdapat beberapa hal, seperti pada tahun 2017 Haiti mengalami penurunan tingkat ketahanan pangan dengan skor indeks 34, sehingga dapat dikatakan mencapai ambang situasi yang mengkhawatirkan (WFP, 2019:4). Kemudian, tahun 2018 Haiti menduduki peringkat 168 dari 189 negara menurut *Human Development Index*. Krisis pangan yang terjadi juga semakin memburuk akibat kebijakan naiknya harga minyak bumi, yang berdampak pada terjadinya pengunduran diri perdana menteri, kerusuhan sipil, pertumbuhan ekonomi yang lemah, depresiasi mata uang, krisis pangan, dan ketidakstabilan politik (Kinanti & Yulianti, 2023:6). Dengan demikian, *World Food Programme* memiliki latar belakang dalam pembentukan *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*, yang didasari oleh permasalahan internal yang terjadi di Haiti, yang dikhawatirkan akan menyebabkan krisis berkelanjutan, terutama krisis pangan.

Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023 tentu memiliki strategi khusus untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi. Hal ini didasari dengan adanya keterlibatan lintas sektor yang cukup panjang. Tinjauan strategis nasional untuk mewujudkan zero hunger, maka diperlukan pencapaian SDGs nomor 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, dan 16 (WFP, 2019:6). Hal ini menunjukkan, bahwa kemajuan untuk menuntaskan SDGs nomor 2 akan memerlukan

investasi dalam prioritas nasional yang lebih luas, seperti sistem perlindungan sosial yang memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dasar bagi kelompok rentan, inisiatif pembangunan yang inklusif, dan mengatasi kesetaraan gender. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka *World Food Programme* memberikan dua strategi khusus, seperti melakukan diversifikasi di sepanjang hubungan kemanusiaan di Haiti. Diversifikasi tersebut dilakukan melalui penerapan intervensi kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat segera, dan kegiatan pemulihan dan ketahanan pangan, termasuk pemberian makanan gratis di sekolah dengan melibatkan pasar lokal secara bertahap, kegiatan yang berkaitan dengan gizi, dan penyediaan logistik darurat (WFP, 2019:8). Kedua, *World Food Programme* melakukan evaluasi, audit, laporan pengawasan guna untuk menilai keberhasilan *output* dan *outcomes*. Strategi ini dilakukan secara individu oleh *World Food Programme* tiap setahun sekali (Morry, 2020:18). Dengan demikian, strategi khusus yang dimiliki oleh *World Food Programme* dapat diimplementasikan guna mencapai keberhasilan program dukungan pada *Haiti Country Strategic Plan* 2019 – 2023.



Gambar 2.4 Strategic Outcome oleh World Food Programme untuk Haiti Pada Tahun 2019 – 2030

Sumber: *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*

Merujuk pada gambar 2.4, dapat dilihat bahwa terdapat SO atau *strategy outcome* dengan 6 poin. Strategi ini merupakan agenda dalam mencapai tujuan SDGs tahun 2030, khususnya SDGs nomor 2. *Strategy outcome* 1 dan 2 memiliki tujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rentan yang terdampak krisis. Kemudian, pada *strategy outcome* 3 dan 4 memiliki tujuan untuk memperkuat akses petani kecil ke pasar internasional, dan membangun ketahanan pangan jangka menengah, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengurangi, beradaptasi, pulih dari guncangan, dan mengelola risiko terkait iklim. Terakhir, pada *strategy outcome* 5 dan 6 memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional Haiti dalam mencapai *zero hunger*, dengan

melakukan peningkatan ketersediaan pangan nasional yang bergizi, yang tetap melibatkan mitra. Dengan demikian, peran yang dilakukan oleh *World Food Programme* termasuk dalam program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*.

Tabel 2.1 Analisis Total Prioritas Penerima Manfaat Berdasarkan Hasil Strategis dan Kegiatan

TABLE 1: BENEFICIARIES BY STRATEGIC OUTCOME AND ACTIVITY (ALL YEARS)*						
Strategic outcome	Activity	Girls	Boys	Women	Men	Total
1	1	166 500	163 500	211 500	208 500	750 000
2	2	15 540	15 260	19 740	19 460	70 000
	3	269 237	264 963	-	-	534 200
3	5	57 355	56 445	-	-	113 800
4	6	17 316	17 004	21 996	21 684	78 000
Total**		509 298	500 822	232 086	228 794	1 471 000

* Girls and boys are beneficiaries under 18 years old.

** Ten percent of beneficiaries under strategic outcome 1 have been excluded from the total in order to remove overlaps with other strategic outcomes.

Sumber: *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*

Merujuk pada tabel 2.1, dapat dilihat bahwa terdapat analisis jumlah sasaran penerima manfaat masing – masing *strategic outcome*. Selain itu, pada tabel hanya tersedia sasaran bagi *strategic outcome* 1 hingga 4 dikarenakan *strategic outcome* 5 dan 6 berfokus pada penguatan pemerintah nasional. Selama program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*, *World Food Programme* akan menjangkau sejumlah 1.471.000 jiwa, dengan menggunakan pendekatan berdasarkan kesetaraan gender (WFP, 2019:19). Meskipun sasaran penerima dalam berbagai kegiatan memiliki kriteria yang berbeda – beda, *World Food Programme* akan

menggunakan basis data nasional yang dikembangkan bersama Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, untuk memastikan sasaran penerima adalah kelompok rentan. Lebih lanjut, *World Food Programme* akan memaksimalkan dukungan untuk pembangunan pertanian melalui peningkatan pembelian produk lokal, dan penyediaan makanan yang dibeli secara lokal serta terpusat. *World Food Programme* juga akan mendukung sedikitnya 50 asosiasi petani kecil, khususnya koperasi perempuan yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar kelembagaan, dan pasar internasional (WFP, 2019:19). Dalam menyukseskan ketepatan penerima sasaran, maka perlu keterlibatan pemerintah Haiti. Pemerintah Haiti dalam *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* termasuk pada sasaran prioritas program, dan kolaborator keberhasilan, sebagaimana selaras pada Rencana Pembangunan Strategis Nasional Haiti Tahun 2012 – 2030 menuju negara dengan ekonomi berkembang. Dengan demikian, sasaran prioritas menjadi hal yang paling utama untuk menentukan keberhasilan sebuah program, dimana dalam implementasi *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* terdapat dua sasaran prioritas program, yaitu masyarakat dan Pemerintah Haiti.

2.3.2. Hasil Pelaksanaan Program

Implementasi program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* tentu berdasar pada 7 poin *strategic outcomes*. Pada tahun 2019

hingga 2023, program tersebut memiliki hasil yang berbeda – beda. Hal ini sesuai dengan situasi yang dialami Haiti pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Haiti mengalami gejolak politik yang cukup berbahaya, terjadi El Nino, serta terjadinya inflasi yang mengakibatkan krisis pangan meningkat dari tahun – tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2020 Haiti juga masih mengalami ketidakstabilan politik, terjadinya Badai Laura, dan terdapat wabah COVID – 19. Lebih lanjut, pada tahun 2021 hingga 2023, Haiti mengalami gejolak politik yang sangat tinggi, yang disebabkan oleh peristiwa pembunuhan Presiden Jovenel Moise, sehingga terjadinya kekosongan kekuasaan selama tiga tahun. Meskipun demikian, dalam situasi ini *World Food Programme* telah mengimplementasikan program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*, yang mendukung keberhasilan 7 poin pada strategic outcomes.

Tabel 2.2 Total Bantuan yang Diberikan *World Food Programme* di Haiti Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Bantuan Pangan Aktual	Jumlah Bantuan Uang Tunai Aktual
2019	4.426 ton	2.606.671
2020	8.657 ton	17.122.891
2021	14.270 ton	34.877.666
2022	5.007 ton	22.837.482
2023	9.000 ton	80.676.468

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Merujuk pada tabel 2.2, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa perbedaan jumlah bantuan pangan, dan bantuan tunai sebagai bentuk implementasi dari *Haiti Country Strategic Plan* 2019 - 2023. Hal ini dapat diuraikan satu persatu pada masing – masing tahun. Pertama, pada tahun 2019, *World Food Programme* memberikan bantuan pangan sejumlah 4.426 ton, dan bantuan tunai sejumlah 2.606.671. Selama tahun ajaran 2019, *World Food Programme* berfokus pada pemberian makanan sekolah, pasar lokal, dan produsen lokal. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya distribusi makanan lebih dari 50% makanan, yang menjangkau sekitar lebih dari 250.000 anak, serta melibatkan 21 petani lokal dalam penyediaan makanan sehat tersebut (WFP, 2020:8). Selain itu, *World Food Programme* juga melakukan pelatihan untuk membangun ketahanan pangan maupun bencana alam, seperti

pembangunan irigasi, pengelolaan air, dan merehabilitasi sekolah yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung jika terjadi bencana alam (WFP, 2020:10). Disisi lain, bantuan tunai diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak – anak yang sedang dirawat akibat kekurangan gizi akut. Dalam mewujudkan program di tahun ini, *World Food Programme* melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja.

Berbeda dengan tahun 2020, jumlah bantuan pangan sejumlah 8.657 ton, dan bantuan tunai sejumlah 17.122.891. Pada tahun ini, *World Food Programme* meningkatkan operasi daruratnya untuk menanggapi peningkatan kebutuhan akibat krisis COVID – 19, dan memberikan bantuan pangan darurat berbasis uang tunai kepada 380.000 jiwa (WFP, 2021:15). Disamping itu, *World Food Programme* juga terus meningkatkan pemberian makanan sekolah, yang melibatkan pasar lokal, dan petani lokal. Namun, dengan adanya COVID – 19 menjadikan distribusi makanan untuk dibawa pulang, dengan jumlah 293.582 anak sekolah (WFP, 2021:18). Selain itu, *World Food Programme* menyediakan layanan logistik, dan rantai pasokan kepada Pemerintah untuk dapat menjangkau masyarakat pada wilayah terpencil. Dalam mencapai upaya yang dilakukan oleh *World Food Programme*, mereka bekerja sama dengan *United Nations Humanitarian Air Service* (UNHAS) untuk penyediaan helikopter dan peralatan rumah sakit ke wilayah

terpencil, serta Kementerian Dalam Negeri dalam hal kesiapsiagaan bencana (WFP, 2021:20).

Tahun 2021 merupakan tahun yang mengalami lonjakan cukup drastis pada bantuan pangan, dan bantuan tunai, bantuan pangan yang didistribusikan sejumlah 14.270 ton, dan bantuan tunai sejumlah 34.877.666. Kenaikan bantuan sebesar 250% ini disebabkan oleh situasi Haiti, yang mengalami ketidakstabilan politik akibat peristiwa pembunuhan Presiden Jovenel Moise, terjadinya gempa bumi dengan 7,2 SR yang disusul dengan badai tropis, terjadinya kekerasan oleh kelompok geng dengan melakukan blockade bahan bakar di Port Au (The Global Economy, 2022). Situasi tersebut menjadikan krisis pangan di Haiti menjadi naik dari tahun sebelumnya. Dalam menangani situasi ini, *World Food Programme* memberikan beberapa upaya, seperti tetap melanjutkan pemberian makanan gratis di sekolah, dengan menjangkau lebih dari 294.323 anak (WFP, 2022:10). Selain itu, *World Food Programme* juga melakukan rehabilitasi, dan memodernisasi aset masyarakat untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap guncangan, dan keadaan darurat, dengan sejumlah 23.594 keluarga (The Global Economy, 2022). Selain itu, penyediaan helikopter menjadi bertambah untuk menanggapi lonjakan kebutuhan transportasi udara guna menjangkau daerah yang terkena dampak

gempa bumi. Dengan demikian, tahun 2021 merupakan tahun dengan distribusi bantuan terbesar oleh *World Food Programme*.

Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 Haiti tetap mengalami ketidakstabilan politik akibat kekosongan kekuasaan, penjarahan gudang *World Food Programme*, kemerosotan ekonomi, dan terjadinya wabah kolera, yang kemudian berdampak pada krisis pangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2022 pertama dalam sejarah negaranya untuk menduduki IPC Fase 5 (bencana dan kelaparan), dan menyebabkan Haiti dijuluki dengan “*worst deterioration in peacefulness*”. Dalam mengatasi permasalahan ini, *World Food Programme* melakukan beberapa upaya penting. Seperti membentuk unit akses untuk menegosiasikan akses ke populasi yang terkena dampak kekerasan oleh kelompok geng, dan untuk mengamankan rute logistik (WFP, 2023:13). Selain itu, *World Food Programme* juga menyediakan fasilitas utama, yaitu rumah sakit, dan pembentukan Direktorat Nasional Air Minum, dan Sanitasi Haiti di Cite Soil. Lebih lanjut, *World Food Programme* juga konsisten untuk memberikan makanan gratis di sekolah, yang meningkat hingga sejumlah 302.201 siswa (WFP, 2023:17). Kemudian, *World Food Programme* bersama dengan Kementerian Sosial memberikan bantuan uang tunai kepada kelompok paling rentan, seperti ibu hamil dan menyusui, anak perempuan, balita, dan

penyandang disabilitas di Grand'Anse sejumlah lebih dari 23.000 rumah tangga (WFP, 2023:22).

Tahun terakhir dari pengimplementasian *Haiti Country Strategic Plan* 2019 – 2023 adalah tahun 2023. Tahun ini, Haiti memiliki julukan baru, yaitu “*the second largest deterioration in peacefulness*”. Hal ini disebabkan oleh naiknya tingkat penculikan, pembunuhan, dan kekerasan seksual oleh kelompok geng. Akibatnya, krisis pangan meningkat dari tahun 2022 sebesar 57,6% (Niño, 2023). Dalam mengatasi permasalahan ini, *World Food Programme* melakukan beberapa upaya diantaranya mendistribusikan 9.000 ton bantuan pangan, dan bantuan tunai sebesar 80.000.000 di seluruh operasi bantuannya, dimana angka ini hampir tiga kali lipat meningkat dibandingkan tahun 2022, dan merupakan rekor bagi *World Food Programme* di Amerika Latin, dan Karibia (WFP, 2024:5). Kemudian, *World Food Programme* juga membangun kantor cabang, dan Gudang baru di Miragoane, dengan kapasitas penyimpanan 2.500 ton, sehingga memungkinkan *World Food Programme*, dan mitranya beroperasi secara efektif. Selain itu, *World Food Programme* juga tetap konsisten untuk memberikan makanan gratis di sekolah kepada 308.565 siswa di 1.843 sekolah (WFP, 2024:16). Dengan demikian, pada tahun ini *World Food Programme* cukup melakukan upaya yang efektif dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi.

Tabel 2.3 Jumlah Penerima Manfaat Bantuan oleh *World Food Programme* Pada Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penerima Manfaat Aktual
2019	1.645.784 jiwa
2020	1.798.486 jiwa
2021	2.474.665 jiwa
2022	2.486.466 jiwa
2023	2.501.212 jiwa

Sumber: Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, 2025

Merujuk pada tabel 2.3, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah penerima manfaat di setiap tahunnya. Hal ini tentu lebih dari analisis jumlah perkiraan penerima manfaat pada program *Haiti Country Strategic Plan 2019 - 2023*. Adapun kenaikan penerima manfaat setiap tahunnya, yaitu dikarenakan situasi krisis pangan yang terjadi diluar perkiraan selama pelaksanaan program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* (WFP, 2024:12). Misalnya, terjadi bencana alam yang terus menerus, dan wabah COVID - 19, ketidakstabilan politik, dan terjadinya kekerasan oleh kelompok geng. Selain itu, terdapat penyesuaian kebijakan, dan strategi pelaksanaan program oleh *World Food Programme* bersama mitra turut berkontribusi pada perluasan cakupan penerima manfaat, sehingga program dapat menjangkau kelompok rentan, yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam rancangan awal

(Prabanawari et al., 2024:7). Dengan demikian, kenaikan jumlah penerima manfaat dari perkiraan analisis oleh *World Food Programme* dapat memperlihatkan bahwa program ini cukup efektif untuk dilakukan dalam taraf yang besar secara darurat.

2.3.3. Tantangan dan Dampak Program

Pada keberjalanan implementasi program *Haiti Country Strategic Plan*, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, kurangnya sinergitas kolaborasi antara Pemerintah Haiti, dan *World Food Programme*. Hal ini disebabkan mulai dari tahun 2019 hingga 2023, situasi pemerintahan maupun politiknya masih mengalami ketidakstabilan. Kemudian, setelah peristiwa pembunuhan Presiden Jovenel Moise, pemerintahan juga sempat mengalami kekosongan kekuasaan, sehingga mengakibatkan bantuan yang diberikan oleh *World Food Programme* kurang terdistribusi dengan baik. Selain itu, adanya tindakan pidana korupsi bantuan tunai oleh anggota legislatif pemerintah memperkeruh situasi krisis pangan di Haiti (BTI, 2024). Hal ini mengakibatkan melemahnya kapasitas institusional, dan terbatasnya sumber daya pemerintah juga memperburuk koordinasi lintas sektor, sehingga program ini seringkali menghadapi hambatan dalam distribusi bantuan, dan penyesuaian strategi di lapangan (WFP, 2023:8). Melihat situasi ketidakstabilan tersebut, *World Food Programme* selama masa keberjalanan program tersebut, sebagian besar turun

langsung ke masyarakat. Meskipun demikian, *World Food Programme* tetap melakukan kerjasama dengan memperkuat kapasitas pemerintah nasional, dan memastikan programnya selaras dengan Rencana Pembangunan Strategis Nasional Haiti 2012 - 2030 (Hassan, 2024:8). Dengan demikian, Haiti telah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian.

Tantangan selanjutnya adalah terjadinya situasi ketidakamanan akibat maraknya kekerasan oleh kelompok geng. Tidak hanya membahayakan masyarakat saja, namun kelompok geng ini juga melakukan beberapa hal yang merugikan *World Food Programme*. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kelompok geng, yang menghancurkan kantor cabang *World Food Programme* di Gonaives, dan dua Gudang di Les Cayes, dan Gonaives pada tahun 2022 (Haiti Libre, 2022). Penjarahan ini pertama dilakukan pada tanggal 15 September 2022 di Gonaives, yang berisikan 1.400 ton makanan yang ditujukan untuk program darurat, dan untuk 100.000 anak yang berpartisipasi dalam program makanan gratis di sekolah (WFP, 2023:7). Kemudian, pada tanggal 20 September 2022 dilakukan penjarahan kedua oleh kelompok geng di Les Cayes. Tempat tersebut berisikan 672 ton bantuan pangan, yang sebelumnya telah disiapkan untuk mengantisipasi musim badai, dan

kelanjutan program makan gratis di sekolah. Selain kehilangan kebutuhan pangan, terdapat beberapa 7 pegawai yang menjadi korban dari peristiwa ini (Haiti Libre, 2022). Meskipun demikian, *World Food Programme* mengalami kerugian, namun dengan sigap telah membangun gudang baru pada tahun yang sama, dan tetap konsisten untuk memberikan bantuan.

Kondisi bencana alam yang terus – menerus terjadi juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan program *World Food Programme*. Haiti merupakan negara yang memiliki letak geografis di jalur badai Atlantik, dan dikombinasikan dengan topografi curam pada wilayah jalur baratnya (World Bank, 2020). Selain itu, kepadatan penduduk terletak pada lembah di sepanjang pantai tanpa adanya drainase, sehingga hal tersebut mengakibatkan saat hujan seringkali mengalami banjir. Dibuktikan pada tahun 2019 hingga 2023, Haiti mengalami banyak bencana, seperti banjir, badai matthew, badai laura, gempa bumi, El Nino, kolera, hingga wabah COVID – 19 (OCHA, 2024). Hal ini menjadi sebuah tantangan sekaligus kekhawatiran atas bantuan yang diberikan dalam jangka panjang. Kondisi ini tentu memperburuk kerentanan masyarakat, yang sudah berada dalam situasi krisis, terutama pada kelompok rentan. Meskipun demikian, bantuan oleh *World Food Programme* tetap terorganisir dengan baik, dan tersalurkan tepat pada penerima manfaat yang seharusnya.

Perlu diketahui, bahwa tantangan merupakan sebuah proses untuk mencapai dampak yang berkelanjutan dari sebuah program. Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Haiti maupun pemerintahannya, seperti terciptanya akses bantuan pangan bagi populasi terdampak krisis. Dalam hal ini, *World Food Programme* dapat memberikan bantuan langsung kepada lebih dari 2 juta masyarakat di Haiti, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan, dan nutrisi selama masa krisis (Concern Worldwide U.S, 2024). Selain itu, pemberian makanan gratis di sekolah menjadi dampak yang cukup baik untuk menunjang keterpenuhan gizi anak – anak. Hal ini dibuktikan dengan data yang diberikan oleh *Haiti Annual Report Country 2023*, bahwa dampak dari program ini telah meningkatkan gizi anak sebagai kelompok rentan sebesar 65,7% dari 763.000 jiwa (BTI, 2024). Lebih lanjut, *World Food Programme* juga dapat memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Hal ini dilakukan dengan dukungan penguatan kapasitas organisasi produsen pertanian kecil melalui akses fasilitas produk pertanian lokal Kementerian Pertanian. Dampak dari adanya penguatan kapasitas ini, maka pada *World Food Programme* berhasil membeli hasil pertanian dari petani lokal itu sendiri, yang terdiri dari 156 juta ton beras, jagung, garam untuk bahan pembuatan makanan gratis di sekolah (Pabari et.al., 2025:64). Dengan demikian, dampak dari

program *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* memiliki dampak yang cukup baik bagi pemulihan atas krisis pangan yang sedang terjadi.